



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon. 0536-4200448 fax. 0536-4200449 email: ukpbj@biropbj.kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 100.3.3.4/12/Bag. II/PB)

TENTANG

DAFTAR INFORMASI, DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Daftar Informasi, Dokumentasi Publik, Klarifikasi Informasi yang dikecualikan yang dikuasai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Brang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA TENTANG DAFTAR INFORMASI, DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP), PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik, pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat serta yang dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Januari 2024



KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,

SUHARNO, ST., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 196808061989031013

Tembusan:

1. Ketua PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BIRO PENGADAAN BRANG DAN JASA SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA											
1	Informasi Kepegawaian dan Profil Biro Pengadaan Brang dan Jasa Setda Prov. Kalteng	Struktur Organisasi	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Lingkup Kerja/Tugas Pokok dan Fungsi	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Visi dan Misi	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Data Pribadi ASN Biro PBJ Kalteng	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dishutkan Kalteng	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Nama dan Profil Singkat Pejabat Struktural	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Daftar Izin dan Cuti	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepegawaian	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓		✓		
		Daftar Urut Kepangkatan PNS Biro PBJ Setda Provinsi Kalteng	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		LKIP Biro PBJ Setda Kalteng	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		LPPD/LKPJ Biro PBJ Setda Kalteng	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
		Daftar Inventaris/ Daftar Peralatan dan Perlengkapan yang Menunjang Pekerjaan	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy			✓		
		Laporan Keuangan/ Implementasi Pelaksanaan Anggaran	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
PENGELOLAAN LAYANAN SECARA ELEKTRONIK											
2	Informasi Pengelola layanan pengadaan secara elektronik di Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah pengelolaan seluruh sistem Informasi pengadaan barang dan jasa(akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				
Dokumentasi Data Brang dab Jasa hasil pengadaan		Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓					
Mengelola Informasi Manajemen Barang dan Jasa		Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓					
Mengelola Informasi Monitoring Rencana Umum Pengadaan		Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓					
Mengelola Informasi lelang Tender- non tender		Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓		
Mengelola Informasi e-purchasing (katalag)		Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓		
Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓					

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											
3	Penyiapan, mengkoordinir perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa,	Implementasi Aplikasi Siap Bajasa	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Rekomendasi Pejabat Pengadaan SKPD	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Pelaksanaan Tender/Lelang	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy				✓	
		Implementasi Ecatalog Lokal	Kepala Bagian	Kepala Biro	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng	Softcopy dan Hardcopy	✓				

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Januari 2024
KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,

SUHARNO, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 496808061989031013

